

SENSUS PENDUDUK DI INDONESIA

Tukiran*

Abstract

Although the population registration in Indonesia has long been put through, the result is still unreliable, thus population census should be considered as a major source in providing data of population and households. Since its independent status, Indonesia has carried out the census for five times: in 1961, 1971, 1980, 1990, and in 2000 with the goals of providing a considerable amount of details of population data such as: buildings and households, villages potential (potensi desa or podes), and main pattern frames for survey and others census applications.

The collected data contain information of households and individuals by the census taking system both de jure and de facto for the entire population of Indonesia, including those living abroads such as diplomatic corps with their family members. For the 2000 population census of Indonesia or SP 2000, the data of household and population by temporary residence status, have been put through by the national Central Bureau of Statistic, whereas the data of those by permanent residence status have been carried out by the Regional Central Bureau of Statistic, which are all predicted would be finished before the end of the year of 2000.

Pendahuluan

Ada tiga metode yang sering digunakan dalam pengumpulan data kependudukan yaitu sensus, survai, dan registrasi. Pengumpulan data dengan metode sensus adalah pencacahan secara menyeluruh terhadap penduduk yang ada pada suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu

pula. Pengumpulan data dengan metode survai adalah pencacahan yang dilakukan hanya sebagian dari penduduk yang ada pada suatu daerah dan waktu tertentu. Pengumpulan data dengan metode registrasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus atau dari waktu ke

* Drs. Tukiran, M.A, adalah peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

waktu untuk penduduk yang ada. Pengumpulan data dengan metode sensus seperti sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi/industri menurut United Nations (1969) sebaiknya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Untuk sensus penduduk dilaksanakan pada tahun yang berakhir dengan digit akhir 0, sensus pertanian biasanya dengan digit akhir 3, dan sensus ekonomi/industri berakhir dengan digit akhir 6. Ketentuan tentang waktu penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis perbandingan yang bersifat internasional. Indonesia dengan berbagai alasan pernah melakukan perubahan waktu dalam melaksanakan Sensus Penduduk (SP) yaitu SP 1961 dan SP 1971, dilaksanakan pada tahun yang berakhir dengan digit akhir 1, yang kemudian dilaksanakan kembali dengan tahun yang berakhir dengan digit akhir 0 (nol) mulai dari SP 1980.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam sensus penduduk yakni sensus penduduk secara lengkap (*overall*) dan sensus penduduk yang hanya mengambil sampel seperti yang digunakan dalam survai kependudukan (*susenas*, *sakernas*, dll). Informasi yang dikumpulkan dalam SP lengkap sangat terbatas

dan hanya data yang sifatnya mendasar, seperti halnya susunan anggota rumah tangga, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan kewarganegaraan. Informasi yang lebih rinci hanya ditanyakan kepada sebagian penduduk atau lebih dikenal hanya mengambil sampel dari hasil SP lengkap. Besar kecilnya jumlah sampel yang ada pada pencacahan sampel (SP sampel) akan berpengaruh pada analisis menurut tingkat administrasi seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Untuk melengkapi data yang ada pada rumah tangga dan individu, sejak SP 1980 dilakukan pula pengumpulan data yang menyangkut potensi geografis, sosial ekonomi, dari semua desa yang ada melalui daftar potensi desa (*podes*). Informasi yang dikumpulkan pada *podes* berlaku untuk seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Data potensi desa mencakup beberapa aspek yaitu profil desa/kelurahan, kependudukan, lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pendidikan, sosial budaya, rekreasi dan hiburan, kesehatan, gizi dan keluarga berencana, perhubungan, penggunaan lahan, ekonomi, dan keamanan.

Hampir di semua negara, sensus penduduk merupakan

sumber utama data kependudukan. Indonesia meskipun sudah melaksanakan pencacahan statistik vital, hasilnya belum begitu baik. Sebagai akibatnya, data sensus penduduk merupakan tonggak referensi waktu yang sekaligus merupakan pengendali data yang diperoleh dari survai kependudukan yang lain (McDonald, 1984). Perlu diingat bahwa tujuan dari sensus penduduk dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan yang mendasar. Paling tidak ada empat hal yang ingin dicapai dari sensus penduduk yakni pertama, menyediakan data dasar kependudukan dan perumahan, khusus untuk SP 2000 data dicatat sampai dengan wilayah administrasi yang terkecil (desa/kelurahan). Kedua, menyediakan data kependudukan untuk estimasi parameter kependudukan. Ketiga, menyediakan data potensi desa (podes). Keempat, menyusun kerangka contoh induk (KCI) yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan sensus ataupun survai lain sebelum sensus penduduk berikutnya (BPS, 1999). Tulisan ringkas ini membahas dinamika pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia mulai dari tahun 1961, 1971, 1980, 1990, sampai 2000, terutama ketersediaan data yang ada pada sensus penduduk,

termasuk di dalamnya berbagai kemungkinan untuk melakukan analisis perbandingan antar-sensus, tingkatan analisis wilayah administrasi dari data sensus lengkap dan sensus sampel. Dibahas pula berbagai kendala yang akan dihadapi oleh pengguna data sebagai akibat ditiadakannya sensus sampel pada SP 2000.

Sensus Penduduk di Indonesia

Pelaksanaan sensus penduduk (SP) di Indonesia dapat dibedakan dalam dua periode yakni sebelum kemerdekaan (1815–1945) dan setelah Indonesia merdeka (1961–2000). Sensus penduduk yang pertama kali diadakan di Indonesia sebelum Indonesia merdeka ialah pada tahun 1815 dan selama 1815–1930, yakni selama 115 tahun, telah dilaksanakan sepuluh kali sensus penduduk. Dari kesepuluh sensus penduduk ini, hanya tiga periode yang cukup baik dalam pelaksanaannya yaitu yang dilaksanakan pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Dari ketiga periode ini, hanya SP 1930 yang kualitas datanya cukup baik dan banyak digunakan sebagai referensi dalam analisis kependudukan di Indonesia. Pelaksanaan SP 1930 dipercayakan kepada Biro Pusat

Statistik yang didirikan pada tahun 1925. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) sensus penduduk dilakukan pada tingkat lokal, tetapi semua dokumen hasil sensus penduduk ini hilang, kecuali untuk Propinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok (Mantra, 1985: 15–16). Setelah Indonesia merdeka, telah dilaksanakan sensus penduduk sebanyak lima kali yakni SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000. Berikut ini disajikan pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia mulai dari 1961–2000, khususnya waktu pelaksanaan, cakupan wilayah, dan jumlah sensus sampel yang diambil serta ketersediaan data untuk setiap sensus.

Cakupan Wilayah

Sensus Penduduk 1961 merupakan sensus yang pertama kali dilakukan setelah Indonesia merdeka. Namun, pada saat itu wilayah Irian Jaya (dulu Irian Barat) dan Timor-Timur belum bergabung dengan Indonesia. Kedua wilayah ini tidak termasuk dalam SP 1961. Hal yang sama untuk wilayah terpencil, pulau-pulau kecil yang sangat sulit dijangkau, serta beberapa suku terasing, terutama yang ada di luar Jawa-Bali tidak tercakup

dalam sensus dan jumlahnya tidak diketahui. Dengan demikian, hasil SP 1961 belum mencerminkan seluruh wilayah Indonesia, terutama Propinsi Irian Jaya tersebut. Adanya kendala transportasi, komunikasi, dan keamanan di daerah-daerah yang masih terisolasi dan yang sulit dijangkau menyebabkan di beberapa wilayah tidak dilaksanakan pencacahan.

Dengan bergabungnya wilayah Irian Jaya dengan Republik Indonesia serta perkembangan transportasi dan komunikasi maka cakupan wilayah SP 1971 jauh lebih luas daripada sensus sebelumnya. Di Propinsi Irian Jaya, karena pertimbangan keamanan dan keterjangkauan wilayah, hanya dilakukan pencacahan untuk daerah perkotaan. Untuk daerah terpencil, pulau-pulau kecil yang berpenduduk dan suku terasing lebih banyak dilakukan pencacahan daripada sensus sebelumnya. Di Propinsi Timor-Timur tidak dilakukan pencacahan karena belum bergabung dengan Indonesia. Kemudian pada SP 1980 cakupan wilayah pencacahan lebih lengkap lagi karena mencakup Propinsi Irian Jaya (perdesaan dan perkotaan) dan Propinsi Timor-Timur khususnya daerah yang aman dan dapat

dijangkau. Sensus penduduk yang keempat yakni tahun 1990 merupakan salah satu pencacahan penduduk dengan cakupan wilayah yang paling lengkap dibandingkan dengan sensus sebelum dan sesudahnya. Hampir di semua daerah terpencil, suku terasing, pulau-pulau kecil, Irian Jaya, dan Timor-Timur dapat dilakukan pencacahan.

Pada SP 2000 yang lebih dikenal dengan pencacahan penduduk menjelang abad milenium, justru cakupan wilayah pencacahan tidak selengkap dibandingkan dengan periode sebelumnya. Propinsi Timor-Timur sudah terpisah dengan Indonesia dengan meninggalkan problema penduduk pengungsi. Penduduk Timor-Timur yang mengungsi ke wilayah Indonesia sebagai migran terpaksa tidak diketahui jumlahnya. Sama halnya pengungsi Timor Timur yang setuju berintegrasi dengan Indonesia dan sedang mengungsi ke propinsi terdekat, terutama di NTT dan NTB, kemungkinan tidak tercacah dalam sensus. Adanya kerawanan wilayah seperti yang terjadi di Propinsi Aceh, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya akan berpengaruh terhadap kelengkapan cakupan wilayah

pencacahan. Harian *Kompas* terbitan akhir Juli 2000 menyebutkan bahwa sampai menjelang akhir Juli masih ada sekitar 950 blok sensus di Irian Jaya yang belum dapat dilakukan pendataan.

Adanya berbagai problema yang dihadapi dalam hal cakupan wilayah ini memberikan indikasi bahwa pengguna data SP 2000 perlu hati-hati. Sebagai contoh, karena pemisahan Propinsi Timor Timur dengan Indonesia, jumlah penduduk Indonesia untuk tahun sebelumnya (1980 dan 1990) dari hasil sensus perlu direvisi karena terjadi penyusutan wilayah Indonesia. Demikian pula, adanya berbagai kerawanan yang terjadi menjelang pelaksanaan sensus sedikit banyak akan berpengaruh pula terhadap kelengkapan cakupan blok sensus. Sensus Penduduk 2000 yang lebih dikenal dengan pencacahan penduduk secara lengkap justru belum dapat mencakup wilayah yang lebih lengkap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada giliran berikutnya, kekurangan cakupan blok sensus dalam pencacahan penduduk tahun 2000 ini akan banyak dirasakan pada ketersediaan data di unit analisis wilayah yang paling rendah yaitu wilayah perdesaan.

Sistem Pencacahan

Pencacahan penduduk dalam sensus dibedakan menjadi dua cara yakni untuk penduduk yang bertempat tinggal secara menetap dan untuk mereka yang bertempat tinggal tidak menetap. Sebagai contoh pada SP 2000, untuk yang bertempat tinggal menetap dihitung dengan menggunakan daftar SP 2000-L2, sedangkan untuk mereka yang tidak menetap digunakan daftar SP 2000-L3. Hal yang sama juga diberlakukan untuk sensus pada tahun-tahun sebelumnya, dan hanya nama dokumen yang berbeda. Jumlah penduduk hasil SP 2000 dapat diperoleh dengan menjumlahkan yang ada pada daftar isian SP 2000-L2 dan SP 2000-L3. Sebelum dilakukan pencacahan dengan menggunakan daftar isian SP 2000-L2 dan SP 2000-L3, terlebih dahulu dilakukan sensus/pendaftaran. Sensus bangunan dan rumah tangga menggunakan daftar isian SP 2000-L1. Dari daftar ini dapat dilakukan rekapitulasi secara cepat untuk mendapatkan jumlah bangunan, jumlah rumah tangga, dan jumlah penduduk.

Pencacahan penduduk pada sistem sensus sejak 1961, 1970, 1980, 1990, dan 2000 ini menggunakan dua cara berikut ini.

1. Sistem *de jure* ialah pencacahan penduduk di tempat mereka biasanya bertempat tinggal, yaitu tempat yang telah dihuni selama 6 bulan atau lebih atau mereka bertempat tinggal kurang dari 6 bulan, tetapi berkeinginan untuk menetap di daerah tersebut.
2. Sistem *de facto* ialah pencacahan penduduk di tempat mereka ditemui oleh petugas pada waktu pencacahan. Mereka tersebut adalah tunawisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil/terasing, penghuni perahu rumah apung, dan penduduk yang sedang bepergian dan belum pernah dicacah di daerah lain.

Dalam upaya untuk mengetahui adanya perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran dan kematian serta perpindahan yang bersifat permanen, yang terjadi pada saat pencacahan sampai dengan 30 Juni 2000, perlu dilakukan pengecekan ulang (*moment telling*) yang dilakukan pada 1 Juli 2000. Kegiatan pengecekan ulang ini dilakukan setelah pencacahan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap seperti tunawisma, pengungsi, dan sejenisnya (BPS, 1999: 4). Dengan menggunakan sistem pencacahan

gabungan antara *de facto* dan *de jure* serta pengecekan ulang selama sensus dilakukan, diharapkan semua penduduk Indonesia dapat tercacah secara menyeluruh. Pada sensus-sensus sebelumnya, juga dilakukan pengecekan ulang untuk mendapatkan data yang lengkap.

Sistem pencacahan dengan model gabungan ini digunakan pula untuk survai kependudukan lainnya seperti sakernas, susenas kor, dan susenas modul. Pada sisi lain, registrasi/pendaftaran penduduk (RP) menurut sistem atau peraturan dalam pencatatan dan pelaporan, sama dengan sistem SP, semestinya datanya dapat diperbandingkan. Bilamana pendataan penduduk dengan sistem RP ini cukup baik, hasilnya dapat digunakan sampai sensus penduduk berikutnya. Perlu diingat bahwa hasil sensus penduduk merupakan pengendali data. Akan tetapi, dalam pelaksanaan RP, cenderung tidak jelas sistem pencacahan mana yang digunakan. Sebagian ada yang menganut sistem *de jure*, ada pula yang tidak tercacah sama sekali karena petugas RP sangat pasif. Petugas RP mencatat dan melaporkan kalau yang bersangkutan melapor pada petugas. Sistem pencatatan pasif inilah yang menyebabkan data hasil RP

tidak banyak dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan (Tukiran dkk., 1989).

Sensus Lengkap dan Sampel

Sensus Penduduk 2000 merupakan sensus yang pertama kali dilakukan secara lengkap, tanpa menggunakan sampel. Dalam arti semua wilayah yang sudah dipetakan dalam blok sensus dicacah secara menyeluruh dengan daftar pertanyaan yang sama. Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti SP 1961, SP 1971, SP 1980, dan SP 1990, yang kesemuanya menggunakan sensus sampel. Sebagai konsekuensi dari sensus lengkap maka seluruh rumah tangga yang ada harus disensus dan seluruh anggota rumah tangga diwawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Dengan menggunakan cara sensus lengkap, maka ada sekitar 52 juta rumah tangga yang perlu dicacah, dengan harus menanggung konsekuensi tentang jumlah petugas sensus, biaya, dan akomodasi lainnya. Sebagai akibatnya, Badan Pusat Statistik telah melakukan penyusutan daftar pertanyaan yang cukup banyak sehingga hanya pertanyaan yang sangat penting yang ditanyakan

untuk seluruh anggota rumah tangga.

Selain Sensus Penduduk 2000, seperti pada sensus sebelumnya juga dilakukan sensus bangunan dan rumah tangga secara menyeluruh. Ini berarti bahwa dua pekerjaan besar yakni sensus penduduk dan sensus bangunan dan rumah tangga dilakukan secara menyeluruh tanpa menggunakan sampel. Dibandingkan dengan sensus penduduk tahunan sebelumnya, kesemuanya menggunakan sensus lengkap untuk bangunan dan sensus sampel yang didasarkan dari hasil sensus bangunan, yang berisikan jumlah bangunan dan rumah tangga. Setelah hasil sensus bangunan dan rumah tangga selesai, sensus sampel dapat dilakukan, dengan hanya sebagian dari rumah tangga tersebut yang menjadi sampel dalam sensus penduduk. Jumlah sensus sampel untuk tahun 1961 sekitar 1 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Kemudian, SP 1971 menggunakan sampel sekitar 3,8 persen, SP 1980 dan SP 1990 sekitar 5 persen, dan SP 2000 menggunakan sensus lengkap.

Sekali lagi, pengguna data dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan, terutama kalau menginginkan analisis antarwaktu seperti data SP 1990

(sensus sampel) dengan SP 2000 (sensus lengkap). Pada SP 1990 dan sebelumnya, hasil sensus sampel tersebut dikalikan atau *blow up* dengan hasil sensus bangunan dan rumah tangga, terutama jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga. Hasil yang didapatkan mirip dengan hasil sensus lengkap seperti yang tampak pada berbagai terbitan BPS seri hasil sensus penduduk. Sekiranya perlu diperhatikan, terutama yang melakukan analisis series waktu (1971-1980-1990-2000), di antara rangkaian waktu tersebut ada yang dihasilkan dengan pencacahan lengkap dan pencacahan sampel, di samping cakupan wilayah yang berbeda-beda seperti telah dibahas sebelumnya.

Pelaksanaan Sensus

Sensus Penduduk 1961 dilaksanakan pada Oktober 1961 tanpa rincian tanggal dan penentuan hari sensus (*census date*). SP 1971 dilaksanakan pada 20 September sampai 4 Oktober dengan hari sensus 24 September. SP 1980 dilaksanakan pada 20 September - 30 Oktober dengan hari sensus 31 Oktober. Sensus penduduk 1990 dilaksanakan pada 15 September - 31 Oktober dengan hari sensus 31 Oktober. Sensus

Penduduk 2000 dilaksanakan pada 1-30 Juni dengan hari sensus 30 Juni. Setelah hari sensus, biasanya dilakukan *moment telling*, yang dimaksudkan untuk mengecek kembali perubahan yang terjadi selama pencacahan penduduk dilaksanakan, yaitu kemungkinan ada perubahan jumlah kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya kekurangan dan kelebihan cacah selama sensus dilaksanakan. Sebagai contoh pada SP 2000, yang dilaksanakan selama tanggal 1 sampai 30 Juni 2000, kemungkinan terjadi perubahan dari kelahiran, kematian, dan perpindahan. Perubahan tersebut akan diteliti kembali pada 1 Juli 2000 dan tanggal ini disebut *moment telling*.

Ketersediaan Data

Tujuan dilakukan sensus penduduk ialah untuk menyediakan data dasar kependudukan dan bangunan serta potensi desa. Di samping hal tersebut, dikumpulkan pula data kependudukan yang lebih rinci dan spesifik untuk estimasi parameter kependudukan serta untuk menyusun kerangka contoh induk (KCI) sebagai dasar perencanaan sensus atau

survai lain sebelum sensus berikutnya dilakukan. Data yang dikumpulkan pada SP 1961 sampel relatif lebih sederhana bila dibandingkan dengan sensus sampel SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000 yang menggunakan sensus lengkap. Data yang cukup lengkap dan dapat diperbandingkan hanya pada SP 1971, SP 1980, dan SP 1990 dengan berbagai catatan, terutama aspek ketenagakerjaan yang menggunakan konsep berbeda. Ini disebabkan pengumpulan data menggunakan sistem yang sama yaitu sensus sampel 2,8 persen untuk SP 1971, 5 persen untuk SP 1980, dan 5 persen untuk SP 1990. Untuk SP 2000 agak sulit diperbandingkan dengan SP 1990 atau sebelumnya karena menggunakan pencacahan lengkap untuk seluruh penduduk Indonesia. Paling tidak, pengguna data SP 2000 harus memberikan catatan khusus bahwa sistem pengumpulan datanya berbeda.

Secara umum memang data yang dikumpulkan pada setiap sensus tidak jauh berbeda, terutama untuk SP 1971, SP 1980, dan SP 1990. Akan tetapi, untuk SP 2000 data yang dikumpulkan tidak serinci seperti tiga sensus sebelumnya. Berikut ini disajikan data yang tersedia pada SP 1961 – 2000 seperti berikut.

1. Data pendaftaran bangunan dan rumah tangga.
 - a. Jenis bangunan, jenis dan unsur rumah, status hunian, dan kepemilikan rumah.
 - b. Jenis rumah tangga, banyaknya rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga.
 2. Data bangunan tempat tinggal dan pemilikan rumah tangga.
 - a. Jenis dan jumlah bangunan fisik, status penguasaan tempat tinggal, jenis atap, dinding, lantai dan luas lantai, dan penerangan.
 - b. Sumber air minum, memasak, mencuci, tempat mandi, tempat buang air besar.
 - c. Penguasaan barang-barang rumah tangga, lemari, kompor, sepeda/sampan, radio, TV, sepeda motor/motor tempel, mobil/kapal motor.
 - d. Penguasaan lahan pertanian: milik sendiri, sewa, gadai, bagi hasil, menggarap, luas lahan yang dikuasai, pemilikan barang rumah tangga.
 3. Data individu/anggota rumah tangga.
 - a. Umur, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, suku bangsa/etnis (hanya SP 2000), agama, dan jumlah jiwa dalam rumah tangga.
 - b. Tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun lalu, dan tempat tinggal sekarang/saat sensus.
 - c. Pendidikan, bahasa yang digunakan, kemampuan berbahasa Indonesia, dan membaca dan menulis.
 - d. Status kegiatan ekonomi, lapangan, jenis dan status pekerjaan, dan jam kerja.
 - e. Perempuan status nikah, cerai hidup, cerai mati, usia perkawinan pertama, jumlah perkawinan, jumlah anak lahir hidup, masih hidup, jumlah anak yang meninggal, bulan dan kelahiran anak terakhir.
- Distribusi rincian data yang dikumpulkan dari SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000 digunakan untuk memudahkan dalam analisis perbandingan antarsensus. Ketersediaan data tentang tempat tinggal dan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan ketersediaan data penduduk pada sensus dapat dilihat pada Tabel 2.

Analisis Sensus Bangunan dan Rumah Tangga

Dengan memperhatikan ketersediaan data yang ada pada sensus, baik data bangunan dan

Tabel 1
Ketersediaan Data Tempat Tinggal dan Rumah Tangga

No.	Tempat tinggal dan rumah tangga	Sensus Penduduk				
		1961	1971	1980	1990	2000
1.	Jenis bangunan		✓	✓	✓	✓
2.	Jumlah bangunan			✓	✓	
3.	Jumlah rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Status pemilikan tempat tinggal		✓	✓	✓	
5.	Banyaknya anggota rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Jenis atap rumah	✓	✓	✓	✓	
7.	Jenis dinding rumah	✓	✓	✓	✓	
8.	Jenis lantai rumah	✓	✓	✓	✓	
9.	Luas lantai rumah			✓	✓	
10.	Penerangan/lampu		✓	✓	✓	
11.	Bahan bakar memasak		✓	✓	✓	
12.	Sumber air minum		✓	✓	✓	
13.	Sumber air mandi/cuci			✓	✓	
14.	Tempat mandi			✓	✓	
15.	Tempat buang air besar		✓	✓	✓	
16.	Jumlah kamar	✓	✓			
17.	Jumlah kakus		✓			
18.	Pembuangan sampah		✓			
	Unsur Rumah					
19.	Pemilikan almari/bufet			✓	✓	
20.	Pemilikan kompor			✓	✓	
21.	Pemilikan sepeda/sampan			✓	✓	
22.	Pemilikan radio/kaset			✓	✓	
23.	Pemilikan TV			✓	✓	
24.	Pemilikan sepeda motor/perahu				✓	
25.	Pemilikan mobil/kapal				✓	
26.	Pemilikan lahan pertanian			✓	✓	
27.	Lahan pertanian yang disewakan			✓	✓	
28.	Lahan pertanian yang disewa			✓	✓	
29.	Lahan yang dikuasai			✓	✓	
30.	Pemilikan ternak sapi	✓		✓		
31.	Pemilikan ternak kerbau	✓		✓		
32.	Pemilikan kuda	✓		✓		
33.	Pemilikan kambing	✓		✓		
34.	Pemilikan babi	✓		✓		
35.	Pemilikan ayam/itik	✓		✓		

Tabel 2
Ketersediaan Data Penduduk pada Sensus Penduduk

No.	Jenis data yang dikumpulkan	Sensus Penduduk				
		1961	1971	1980	1990	2000
	Semua Umur					
1.	Hubungan dengan kepala rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Jenis kelamin	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tanggal, bulan, tahun kelahiran	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Umur	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Status perkawinan	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Agama	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Kewarganegaraan/suku bangsa	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Tempat lahir, propinsi	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Pernah tinggal di propinsi lain		✓	✓	✓	
10.	Tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di propinsi ini		✓		✓	
11.	Lama tinggal di propinsi ini		✓		✓	
12.	Ibu kandung tinggal dalam rumah tangga ini			✓	✓	
	Umur 5 tahun ke atas					
13.	Propinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu			✓	✓	✓
14.	Pernah sakit minggu lalu			✓		
15.	Tempat/cara pengobatan			✓		
16.	Penderita cacat			✓		
17.	Jenis cacat			✓		
18.	Status sekolah			✓	✓	
19.	Pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti			✓	✓	
20.	Tingkat/kelas tertinggi yang sedang/pernah diikuti			✓	✓	
21.	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	✓	✓	✓	✓	
22.	Jurusan pendidikan		✓	✓	✓	✓
23.	Bahasa ibu yang digunakan		✓		✓	
24.	Bahasa sehari-hari di rumah			✓	✓	
25.	Dapat berbahasa Indonesia			✓	✓	
26.	Dapat membaca dan menulis	✓	✓	✓	✓	

Lanjutan: Tabel 2 Ketersediaan Data Penduduk pada Sensus Penduduk

No.	Jenis data yang dikumpulkan	Sensus Penduduk				
		1961	1971	1980	1990	2000
	Umur 10 tahun ke atas					
27.	Kegiatan terbanyak seminggu lalu		✓	✓	✓	✓
28.	Bekerja minimal 1 jam seminggu			✓	✓	✓
29.	Mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja			✓	✓	
30.	Pernah bekerja sebelumnya			✓	✓	
31.	Jumlah jam kerja seluruhnya		✓	✓	✓	
32.	Jumlah jam kerja pekerjaan utama			✓	✓	
33.	Jumlah hari kerja			✓	✓	
34.	Jenis pekerjaan utama	✓	✓	✓	✓	✓
35.	Lapangan pekerjaan utama	✓	✓	✓	✓	✓
36.	Status pekerjaan utama	✓	✓	✓	✓	✓
37.	Mempunyai pekerjaan tambahan				✓	
38.	Lapangan pekerjaan tambahan				✓	
39.	Mencari pekerjaan seminggu yang lalu			✓	✓	
40.	Alasan tidak cari kerja			✓	✓	
41.	Bekerja selama setahun lalu			✓	✓	
42.	Lapangan kerja setahun lalu			✓	✓	
	Perempuan pernah menikah					
43.	Bulan, tahun perkawinan pertama			✓	✓	
44.	Umur pada perkawinan pertama			✓	✓	
45.	Jumlah perkawinan			✓	✓	
46.	Jumlah anak lahir hidup	✓	✓	✓	✓	✓
47.	Jumlah anak masih hidup	✓	✓	✓	✓	✓
48.	Jumlah anak sudah meninggal			✓	✓	
49.	Bulan, tahun kelahiran hidup anak terakhir			✓	✓	
50.	Anak lahir hidup terakhir masih hidup			✓	✓	
51.	Cara KB yang pernah dilakukan			✓		
52.	Cara KB yang digunakan sekarang			✓		

rumah tangga maupun data individu terbuka peluang yang cukup besar untuk melakukan analisis perubahan dari setiap sensus. Menurut United Nations (1969 dan 1971), hasil sensus bangunan/tempat tinggal dan rumah tangga, meskipun jumlah dan jenis data yang dikumpulkan cukup banyak, di banyak negara sedang berkembang sangat terbatas dianalisis. Pengguna data jauh lebih banyak menganalisis data kependudukan daripada data bangunan dan rumah tangga. Ini sangat disayangkan karena data bangunan dan rumah tangga dikumpulkan secara sensus lengkap.

Indonesia tampaknya mengalami hal yang sama. Ini tampak sekali apabila diperhatikan dari publikasi yang sangat terbatas untuk laporan bangunan dan rumah tangga. Menurut United Nations (1974) data rumah tangga di Indonesia pada SP 1971 sangat lengkap, tetapi tidak banyak yang digunakan dalam analisis rumah tangga. Hal yang sama juga disebutkan oleh McDonald (1984) dalam panduan analisis sensus 1971 dan 1980, bahwa analisis tentang keadaan bangunan dan rumah tangga sangat terbatas dibandingkan dengan data yang dikumpulkan. Seperti disajikan pada rincian data yang dikumpul-

kan diberikan peluang yang sangat besar untuk melakukan analisis. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah data yang dikumpulkan dari sensus ke sensus sangat beragam. Artinya, jenis data bangunan dan rumah tangga dari sensus ke sensus cukup besar variasinya sehingga cukup sulit untuk analisis perbandingan antarwaktu, utamanya pemilikan rumah tangga. Berbagai kemungkinan analisis bangunan dan rumah tangga dapat dilakukan berdasarkan jenis data yang ada pada rincian data tersebut.

Analisis Potensi Desa (Podes)

Perlu diingat bahwa Badan Pusat Statistik wilayah desa/kelurahan yang dikenal dengan podes dimulai sejak SP 1980. Selama 20 tahun (1980–2000) telah dilakukan pengumpulan data podes sebanyak 7 kali yaitu bersamaan dengan Sensus Penduduk (1980, 1990, 2000) dengan Sensus Ekonomi (1986 dan 1996) dan bersamaan dengan Sensus Pertanian (1983 dan 1993). Dari sensus ke sensus, jenis data yang dikumpulkan pada podes tidak banyak berubah apabila dibandingkan dengan data bangunan dan rumah tangga. Data podes dapat menggambar-

kan kesejahteraan masyarakat dan penyusunan statistik pada tingkat desa atau wilayah kecil (*small area welfare and statistics*). Selain itu, dapat pula digunakan untuk penentuan lokasi dan jenis investasi usaha pada tingkat desa (BPS, 1999a).

Dengan memperhatikan rendahnya pemanfaatan data podes yang ada, BPS perlu melakukan sosialisasi/diseminasi tentang tujuan dan data yang ada pada podes. Jumlah dan jenis data yang cukup banyak ini sebetulnya dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan, terutama keadaan bangunan tempat tinggal dan keadaan penduduk seperti yang direkomendasikan oleh United Nations (1992). Apa yang direkomendasikan oleh United Nations ini memang ada betulnya apabila memperhatikan dari 10 aspek/kelompok data yang dikumpulkan, seperti yang disajikan pada data yang tersedia. Problemanya adalah mengapa data yang cukup rinci ini, tersedia setiap tiga tahun dan dikumpulkan secara sensus lengkap, kurang dimanfaatkan? Justru yang dijumpai di lapangan adalah instansi/pengguna data mengumpulkan data yang hampir sama, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sama halnya dengan

data sensus bangunan dan rumah tangga, berbagai kemungkinan analisis dapat dilakukan dengan memperhatikan data yang ada pada daftar pertanyaan podes maupun bangunan dan rumah tangga. Analisis gabungan dari kedua sumber data ini sangat penting untuk memantau hasil pembangunan, mulai dari wilayah kecil yaitu desa/kelurahan sampai pada tingkat regional dan nasional.

Analisis Sensus Penduduk

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan sensus penduduk dari sistem sensus sampel (1961, 1971, 1980, dan 1990) ke sensus lengkap (2000) menyebabkan jumlah dan jenis data mengalami pengurangan yang cukup mendasar. Data yang dikumpulkan pada SP 1961 dan SP 1971 relatif sederhana apabila dibandingkan dengan SP 1980 dan SP 1990 yang sangat lengkap sampai mencapai sekitar 50 variabel. Sebaliknya, data yang dikumpulkan pada SP 2000 lebih terbatas lagi dan hanya mencapai sekitar 15 variabel. Ini berarti bahwa peluang untuk melakukan analisis perbandingan antarsensus menjadi sangat terbatas. Tampaknya data yang dikumpulkan pada SP 2000 hanya merupakan data

pokok/inti, sedangkan yang lengkap akan dikumpulkan melalui survai seperti Survai Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), baik Susenas Inti (Kor) maupun Susenas Modul.

Dilihat dari jumlah data yang dikumpulkan, untuk SP 2000 memang sangat sedikit sehingga banyak kendala yang muncul dalam analisis komparasi dengan sensus sebelumnya. Namun, untuk analisis berbagai tingkat administrasi sangat dimungkinkan mulai dari tingkat desa/kelurahan karena data tersebut dikumpulkan secara sensus lengkap. Ini berarti bahwa pengguna data dapat melakukan analisis mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya. Hal seperti ini sulit dilakukan pada sensus sebelumnya. SP 2000 memang dirancang untuk menampilkan profil wilayah mulai dari desa/kelurahan, baik itu profil kependudukan, bangunan dan rumah tangga, maupun podes. Dari sisi BPS inilah untuk pertama kali disajikan ketiga kelompok data tersebut, yang dapat dimanfaatkan bagi pengguna data secara simultan, mulai dari potensi desa/kelurahan, dalam hubungannya dengan keadaan

bangunan dan rumah tangga dan penduduk, baik sebagai individu maupun kelompok pada suatu wilayah. Menurut White (1993) data sensus yang dikumpulkan dengan biaya yang sangat mahal kurang dimanfaatkan dalam menyusun berbagai perencanaan pembangunan. Pengguna data lebih tertarik untuk mengumpulkan data sendiri meskipun telah tersedia data dari hasil sensus. Bahkan, dalam membahas dinamika jumlah dan distribusi penduduk saja harus dikumpulkan data yang sebenarnya dapat diestimasi dari hasil sensus.

Penutup

Adanya perubahan pelaksanaan sensus penduduk dari sistem sensus sampel yang dilaksanakan pada SP 1961, SP 1971, SP 1980, dan SP 1990 menjadi sensus lengkap pada SP 2000 membawa implikasi yang cukup besar dalam penyediaan data, terutama data kependudukan. Data tentang sensus bangunan dan rumah tangga sejak 1961–2000 tetap dilakukan dengan sensus lengkap, demikian halnya dengan potensi desa (podes) sejak 1980–2000. Data kependudukan sejak SP 1961–1990 dikumpulkan dengan sistem sensus sampel, kemudian pada SP 2000 berubah menjadi

sensus lengkap. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, data kependudukan pada SP 2000 sangat terbatas dan hanya merupakan data pokok karena data yang lain akan dikumpulkan melalui survai kependudukan, terutama Susenas Kor, Susenas Modul, dan Sakernas.

Kesulitan yang dihadapi bagi pengguna data sensus ialah apabila ingin melakukan analisis perbandingan antarsensus. Tampaknya SP 2000 tidak sepenuhnya dirancang untuk keperluan ini meskipun peluangnya masih tersedia dalam jumlah variabel sangat terbatas. Akan tetapi, karena SP 2000 dalam melakukan pendataan bangunan dan rumah tangga serta potensi desa dan sensus penduduk kesemuanya dilakukan dengan sensus lengkap, mulai dari desa/kelurahan, berbagai analisis

kependudukan dapat dimulai dari unit wilayah paling kecil, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Kini tiba saatnya bagi pengguna data untuk dapat melakukan analisis secara simultan, mulai dari tingkat desa/kelurahan tentang potensi desa dalam hubungannya dengan keadaan bangunan dan rumah tangga dan sekaligus dihubungkan dengan penduduknya. Pengolahan data SP 2000 dengan sistem *scanner* yang ada pada setiap propinsi dan beberapa kabupaten/kotamadya akan memperpendek waktu antara pengumpulan data sampai pada pemanfaatan data. Menurut rencana, sebelum akhir tahun 2000 hasil sensus penduduk sudah dapat dimanfaatkan, data yang tersedia sampai pada unit wilayah paling rendah yaitu desa/kelurahan.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 1999. *Pedoman Pencacah Sensus Penduduk 2000*. Jakarta.
- . 1999a. *Pedoman Pencacah Podes SP 2000*. Jakarta
- Biro Pusat Statistik. 1989. *Pedoman Pencacahan Sensus Penduduk 1990*. Jakarta
- McDonald, Peter F. 1984. *Pedoman Analisa Data Sensus Indonesia 1971-1980*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Tukiran, Sukamdi, dan Sofian Effendi. 1989. *Pelaksanaan Registrasi Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- United Nations. 1969. *Handbook of Population and Housing Census Methods*. Part II. New York.
- . 1971. *Handbook of Population and Housing Census Methods*. Part VI. New York.
- . 1971a. *Methodology of Demographic Sample Surveys*. New York.
- . 1974. *Handbook of Population and Housing Census Methods*. Part IV. New York.
- . 1992. *World Population Monitoring 1991*. New York
- White, Michael J. 1993. "Measurement of population size composition and distribution" in George W. Rumsey (ed.), *Readings in Population Research Methodology*. Chicago: Social Development Centre. pp. 1-29.